BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dengan efektifnya Undang-undang mengenai otonomi daerah pada tahun 2001, maka pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan daerahnya termasuk perekonomian daerah tersebut secara lebih otonom dengan harapan dapat memaksimalkan seluruh potensi dalam daerah tersebut.

Tak dapat dipungkiri bahwa sejak efektifnya otonomi daerah di Indonesia, banyak daerah-daerah yang mengalami kemajuan dibidang pengelolaan keuangannya. Hal ini dicerminkan oleh evaluasi yang dilakukan oleh kemendagri yang menyatakan hampir sebagaian daerah mempunyai kinerja keuangan yang baik setelah ada otonomi daerah dimana dari 33 Provinsi yang dievalusi, 29 diantarnya memperoleh status penilaian tinggi. Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah mendapat nilai 3 teratas. Adapun provinsi yang mendapatkan status sedang ada 4, yakni Aceh, Papua, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Untuk tingkat kabupaten, dari 344 kabupaten yang di evaluasi, 269 diantaranya berstatus kinerja tinggi, 70 kabupaten berstatus sedang dan hanya 5 kabupaten yang berstatus rendah yakni Parigi Moutung, Halmahera Utara, Supiori, Tolikara dan Seram Bagian Timur. Kemudian dari 86 kota yang dievaluasi, 82 diantaranya mendapat status tinggi dan hanya 4 yang mendapat

status sedang yaitu Kota Tomohon, Singkawang, Palu dan Kupang(www.djkd.depdagri.go.id).

Selain itu, hal positif mengenai otonomi daerah juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Priyo dan Wirawan (2007), riset tersebut menjelaskan bahwa ada implikasi positif dari otonomi daerah terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Riset ini menjelaskan bahwa setelah otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah di wilayah jawa dan bali mengalami peningkatan daripada sebelum diberlakukannya otonomi daerah.

Dengan peningkatan pendapatan asli derah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan didaerah tersebut termasuk dalam hal pembangunan. Alokasi anggaran yang memuat dana-dana pembangunan dapat dilihat dari alokasi belanja pembangunan atau modal. Namun kenyataannya, dibalik meningkatnya kinerja keuangan yang diwakili oleh terus meningkatnya pendapatan asli daerah, ternyata masih banyak pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran pembangunan didaerahnya masih minim. Hal ini dapat terlihat dalam penelitian Priyo dan Wirawan (2007) yang menyebutkan walaupun secara nominal pertumbuhan pendapatan asli daerah meningkat, tetapi kontribusi pendapatan asli daerah justru menurun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan total belanja daerah lebih besar jika dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah. Hal ini diperparah oleh evaluasi Bappenas mengenai total alokasi belanja modal dalam APBD dimana prosentase alokasinya cenderung menurun seperti grafik yang dibawah ini.

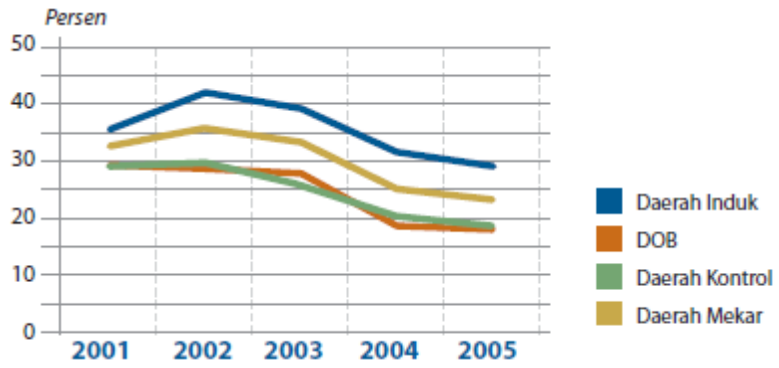

Grafik I. Total Alokasi Belanja Modal terhadap Total Belanja.

Sumber: Bappenas

Untuk dapat meningkatkan terhadap belanja modal, perlu dilakukan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dan salah satu pos yang paling berpotensi adalah retribusi daerah. Retribusi daerah dapat dijadikan solusi mengenai peningkatan alokasi belanja modal karena retribusi daerah merupakan sumber pendanaan yang paling terikat. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan ini bersifat timbal balik antara kemauan seseorang dengan pelayanan tertentu yang diberikan(Khairul Muluk;2005). Namun, retribusi daerah dapat merugikan pemerintah daerah itu sendiri jika dalam pelaksanaannya retribusi daerah salah dipetakn. Hal ini bisa menjadi salah satu penghambat investasi didaerah tersebut yang dapat menyebabkan minimnya pembangunan didaerah tersebut karena terlalu banyak pungutan retribusi daerah(bisnis.com). jika investasi didaerah tersebut rendah, maka pos pendapatan asli daerah yang lain seperti pajak daerah akan menjadi berkurang sehingga akan mengurangi ketersediaan dana untuk belanja daerah.

Jika biaya yang dikeluarkan untuk belanja daerah melebihi dari pendapatan yang diterima daerah tersebut, maka akan terjadi defisit anggaran. Untuk menambal anggaran yang defisit terdapat beberapa cara untuk mengatasinya, salah satunya dengan mengajukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah biasanya menjadi alternatif terakhir bagi sebuah daerah untuk menutupi defisit anggaran APBD daerah tersebut. Alternatif ini sangat jarang digunakan karena syaratnya yang sulit dan akan membebani APBD ditahun-tahun selanjutnya.

Banyak pihak yang menilai, pinjaman daerah bukanlah salah satu pilihan bijak untuk mengatasi hal tersebut. Lora dan Mauricio (2006) mengungkapkan bahwa secara jangka panjang pinjaman daerah akan mengganggu keuangan daerah tersebut karena semakin banyak pinjaman daerah maka akan butuh banyak alokasi untuk pembayaran hutang serta bunganya yang akan menyebabkan alokasi belanja untuk kebutuhan lain akan terganggu. Oleh sebab itu kemendagri berpendapat agar pemda yang ingin mengajukan pinjaman terhadap pihak lain sebaiknya mengukur kemampuan daerahnya untuk mengembalikan bunga serta pokok pinjamannya.

Belanja modal yang tepat dan efesien akan membuat kegiatan pembangunan didaerah tersebut akan menjadi lebih maksimal. Pembangunan daerah yang dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan kebutuhannya akan meningkatkan gairah ekonomi yang dapat membuat tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio kinerja keuangan berupa rasio efektifitas serta rasio efesiensi untuk mengukur kinerja keuangan daerah tersebut.

Kontribusi peneliti dalam penelitian yang menggunakan variabel yang sama adalah memperluas cakupan wilayah dan tidak terfokus pada satu provinsi saja seperti yang sudah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya serta menggunakan variabel pinjaman daerah yang masih sedikit diteliti untuk kabupaten kota di Indonesia.

Ada beberapa penelitian yang sebelumnya meneliti mengenai variabel dalam penelitian ini. Namu terjadi ketidakkonsistensi terhadap hasil dari penelitian-penelitian tersebut seperti hasil dari fitriyanti dalam Joko Tri Haryanto (2005) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kapasitas fiskal untuk membiayai belanja daerah tersebut. Hal ini berbeda dengan hasil yang dari penelitian Darwanto dan Yuli (2007) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah yang salah satu komponen utamanya adalah retribusi daerah yang berpengaruh terhadap belanja modal.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka dapat dilihat secara umum, kinerja keuangan, retribusi daerah, dan pinjaman daerah akan berdampak secara langsung maupun kepada belanja modal. Selain itu adanya inkonsistensi hasil terhadap beberapa penelitian sebelumnya menyebabkan perlu adanya sebuah penelitian untuk menguji hal ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul "**Pengaruh Kinerja Keuangan, Retribusi Daerah, dan Pinjaman Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal**"

1.2.Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh secara parsial rasio efektifitas terhadap alokasi belanja modal?
2. Apakah ada pengaruh secara parsial retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal?
3. Apakah ada pengaruh secara parsial pinjaman daerah terhadap alokasi belanja modal?
4. Apakah ada pengaruh secara simultan rasio efektifitas, retribusi daerah dan pinjaman daerah terhadap alokasi belanja modal?

1.3.Tujuan Penelitian.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh secara parsial antara rasio efektifitas terhadap alokasi belanja modal.
2. Untuk menguji pengaruh secara parsial antara retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal.
3. Untuk menguji pengaruh secara parsial antara pinjaman daerah terhadap alokasi belanja modal.
4. Untuk menguji pengaruh secara simultan antara rasio efektifitas, retribusi daerah dan pinjaman daerah terhadap alokasi belanja modal.

1.4.Manfaat Penelitian.

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi peneliti, bagi mahasiswa lain, serta bagi masyarakat umum seperti berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana bagi peneliti untuk mengeksplorasi pengetahuan peneliti terhadap pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik dalam hal ini akuntansi di daerah. Serta penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yg ingin meneliti dalam bidang yang sama.
2. Penelitian ini bermanfaat sebagai landasan bagi mahasiswa lain yang ingin mendalami tentang akuntansi sektor publik terutama yang berkaitan dengan publik yang sesuai dengan penelitian ini.
3. Penelitian ini bermanfaat sebagai umpan balik bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah yang mempunyai dampak bagi pertumbuhan daerah tersebut. Serta penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengaya ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor ini.